

**PERAN KELOMPOK INDUSTRI PERSENJATAAN TERHADAP KEBIJAKAN
EKSPOR PERSENJATAAN AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN
DONALD TRUMP: STUDI KASUS ARAB SAUDI**

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S.Sos) Strata-1



**Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang**

2024

**PERAN KELOMPOK INDUSTRI PERSENJATAAN TERHADAP
KEBIJAKAN EKSPOR PERSENJATAAN AMERIKA SERIKAT
PADA MASA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP: STUDI KASUS
ARAB SAUDI**

Diajukan Oleh :

RIZKI RAMADHAN

201910360311282

Telah disetujui

Pada hari / tanggal, Kamis, 11 Januari 2023

Pembimbing,



Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt.

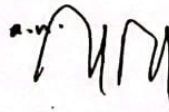
Wakil



Najamuuddin Khairur Rijal, M.Hub.Int.

Ketua Program Studi

Hubungan Internasional



Dr. Dyah Estu Kurniawati, M.Si

SKRIPSI




Dipersiapkan dan disusun oleh :

Rizki Ramadhan
201910360311282

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
L U L U S

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S-1) Hubungan Internasional
Pada hari Kamis, 04 Januari 2024
Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. Haryo Prasodjo, M.A. ()
2. Devita Prinanda, M.Hub.Int. ()
3. Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt. ()




Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Najamuddin Khasan Rijal, M.Hub.Int.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Rizki : Ramadhan
NIM 201910360311282
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi PERAN KELOMPOK INDUSTRI PERSENJATAAN TERHADAP
KEBIJAKAN EKSPOR PERSENJATAAN AMERIKA SERIKAT
PADA MASA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP: STUDI
KASUS ARAB SAUDI
Pembimbing 1. Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt

Kronologi Bimbingan:

Tanggal	Paraf Pembimbing	Keterangan
8/11/2023		Pengajuan Judul
8/12/2023		Penyesuaian data
21/12/2023		ACC Sidang

Malang, 18 Januari 2024
Menyetujui,
Pembimbing



Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial * Ilmu Pemerintahan * Ilmu Komunikasi * Sosiologi * Hubungan Internasional
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144 Pes. 132

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rizki Ramadhan
NIM : 201910360311282
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul : PERAN KELOMPOK INDUSTRI PERSENJATAAN TERHADAP KEBIJAKAN EKSPOR PERSENJATAAN AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP: STUDI KASUS ARAB SAUDI

adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Januari 2024
Yang Menyatakan,



Rizki Ramadhan

ABSTRAK

Rizki Ramadhan, 2019, 201910360311282, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Peran Kelompok Industri Persenjataan Terhadap Kebijakan Ekspor Persenjataan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Donald Trump: Studi Kasus Arab Saudi, Dosen Pembimbing: Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt.

Statistik menunjukkan bahwa Amerika Serikat selama masa pemerintahan Donald Trump mengalami peningkatan jumlah ekspor persenjataan dengan jumlah yang cukup besar. Setidaknya, pada tiga tahun masa kepemimpinan Donald Trump (2017 -2019), ekspor persenjataan Amerika Serikat mencapai angka rata-rata tertinggi dalam 20 tahun yakni 11,07 miliar TIV (Trend Indicator Value) pertahun. Angka ini naik kurang lebih 20% jika dibandingkan dengan nilai ekspor persenjataan selama 4 tahun masa pemerintahan Barack Obama periode kedua. Meningkatnya ekspor persenjataan tentu memberikan angin segar bagi industri manufaktur persenjataan Amerika Serikat. Pengambilan keputusan dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat banyak dipengaruhi oleh kelompok kepentingan (lobbying group), tak terkecuali dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan ekspor persenjataan. Atas dasar itu, penulis berupaya untuk menganalisis bagaimana dan sejauh mana pengaruh kelompok kepentingan dalam peningkatan ekspor persenjataan Amerika Serikat di masa kepemimpinan Donald Trump. Sebagai instrumen dalam analisis topik ini, penulis akan menggunakan perspektif politik domestik dalam analisis kebijakan luar negeri. Dan penulis menyimpulkan, hasil analisis menggunakan 5 variabel pemetaan politik domestik bahwa kelompok industri persenjataan berpengaruh terhadap kebijakan ekspor persenjataan ke Arab Saudi.

Kata Kunci: *Amerika Serikat, ekspor senjata, kelompok kepentingan, Donald Trump, senjata, keamanan*

Menyetujui,
Pembimbing,



Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M. StratSt.

Malang, 18/01/24

Peneliti,

Rizki Ramadhan

ABSTRACT

Rizki Ramadhan, 2019, 201910360311282, University of Muhammadiyah Malang, Faculty of Social and Political Science, International Relation Study Program, Peran Kelompok Industri Persenjataan Terhadap Kebijakan Ekspor Persenjataan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Donald Trump: Studi Kasus Arab Saudi, Supervisor: Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M. StratSt.

Statistics shows that the United States during the Donald Trump administration experienced a considerable increase in the number of arms exports. At least, in the three years of Donald Trump's leadership (2017-2019), US arms exports reached the highest average figure in 20 years, namely 11.07 billion TIV (Trend Indicator Value) per year. This figure increased by approximately 20% when compared to the value of arms exports during the 4 years of Barack Obama's second term. The increase in arms exports certainly provides fresh air for the United States arms manufacturing industry. The decision-making and foreign policy of the United States are heavily influenced by interest groups (lobbying groups), including in influencing foreign policies related to arms exports. On that basis, the author seeks to analyze how and to what extent interest groups have influenced the increase in US arms exports under the leadership of Donald Trump. As an instrument in analyzing this topic, the author will use the perspective of domestic politics in foreign policy analysis. And the author concludes, the results of the analysis using 5 domestic political mapping variables that the arms industry group affects the arms export policy to Saudi Arabia.

Keyword: *United States, arms exports, interest groups, Donald Trump, weapons, security*

Malang, 18/01/24

Approved,
Advisor,



Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M. StratSt.

Resercher,



Rizki Ramadhan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh Alhamdulillah rabbi'l'alamin, segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Peran Kelompok Industri Persenjataan Terhadap Ekspor Persenjataan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Donald Trump: Studi Kasus Arab Saudi”** dengan baik, yang mana dengan ini penulis juga dapat menyelesaikan serta memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Tidak lupa shalawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW selaku tauladan dan panutan bagi para umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan tugas akhir ini tentunya tidak luput dari banyaknya dukungan, bantuan, dan doa yang penulis dapatkan dari berbagai pihak baik secara langsung, maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan, kesungguhan hati, serta rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Ibu Kandung penulis, Ibu Betty yang dengan segala kesulitan yang saat ini sedang dihadapi tidak lupa untuk selalu mendoakan dan mengusahakan penulis agar menuntaskan perkuliahan dengan baik. Yang dengan ketulusan dan kasih sayangnya selalalu mendukung penulis menjadi seorang yang bisa menyelesaikan tanggung jawab pendidikan.
2. Kepada jajaran Dosen dan pengajar Prodi HI UMM yang telah memberikan ilmunya, sehingga penulis mampu menangkap dan mengolah ilmu dan informasi yang dibagikan pada penulis sebagai penunjang kelancaran dan kemudahan penulis dalam belajar di Prodi HI UMM. Semoga jasa
3. Syasya Yuania Fadila, M.Strat., selaku dosen wali penulis. Terima kasih atas waktu, bimbingan, tuntunan, saran, serta dukungan yang diberikan selama menjadi dosen wali penulis. Terima kasih karena bersedia memberikan saran dan kritik yang membangun sehingga penulis dapat berkembang.
4. Kepada teman-teman yang dulu bersama-sama pernah bersekolag di Gema Nurani, Abim, Rafli, Widlan, Farid, dan Iki , yang sudah menyemangati penulis, membantu memberikan ide terkait penelitian yang penulis lakukan dan bahkan peduli terhadap tiap *progress* yang penulis punya, penulis ucapkan terima kasih. Mari rayakan dengan sparing FIFA, *cuy*.

5. Untuk Ayah penulis, *well, you still my dad after all.*
6. Bang Fachrul, Kak Fina, Kak Ira, Kak Ela, Kak Lia. Terima kasih atas nasehat dan masukannya, sebagai saudara tidak mungkin akrab terus, *but thank you.*
7. Kawan-kawan tercinta masyarakat Tobangadou Gary (Icon, Anis, dan Indri) yang selalu bersama sejak pertama kali menjadi mahasiswa hingga saat ini. Terima kasih karena selalu saling mengulurkan tangan, saling menghibur, saling mengingatkan, dan saling memberi dukungan. Selalu do'a terbaik bagi kalian,
8. Ozzy Osbourne, Tommy Iomi, Geezer Butler, & Bill Ward. Terima Kasih telah melahirkan genre metal ke dunia ini, *Hail Prince of Darkness.*
9. Tom Araya, Kerry *effing* King, Jeff Hanneman, & Dave Lombardo. Terima kasih telah meramaikan genre *Thrash Metal* dan menjadi salah satu dari *BIG 4 OF THRASH. HAIL SLAYER.*
10. Maximillian DOOD, Cohh Carnage, TheOnlyRyann, Minion777, Caseoh, sovietwomble, yang sudah membantu penulis untuk bisa merasa terhibur dengan tayangan *gameplay* dari berbagai macam *video game* sehingga membantu memperbaiki *mood* penulis dalam berkegiatan.

Terima kasih, dan wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 01 Desember 2023



Rizki Ramadhan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	I
LEMBAR PENGESAHAN	I
SURAT PERNYATAAN.....	IV
ABSTRAK.....	V
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR GAMBAR	X
PLAGIASI.....	XI
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. KERANGKA TEORETIS.....	6
C. Metode Penelitian.....	9
D. PEMBAHASAN.....	9
<i>Signifikansi Industri Persenjataan Amerika Serikat pada Masa Kepemimpinan Donald Trump</i> ..9	
<i>Lobi Industri Persenjataan Amerika Serikat</i>	11
<i>Studi Kasus: Aktivitas Lobi dalam Kebijakan Ekspor Persenjataan ke Arab Saudi</i>	13
<i>Analisis Dimensi Pengaruh Politik Domestik dalam Lobi Perusahaan Persenjataan</i>	15
E. KESIMPULAN	17
Daftar Pustaka.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Statistik Ekspor Persenjataan AS.....	3
Gambar 2 Model Analisis.....	8
Gambar 3 Iron Triangle.....	12



PLAGIASI



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL
hi.umm.ac.id | hi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : E.5.a/024/HI/FISIP-UMM/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Rizki Ramadhan
NIM : 201910360311282
Judul Skripsi : Peran Kelompok Industri Persenjataan Terhadap Kebijakan Ekspor Persenjataan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Donald Trump: Studi Kasus Arab Saudi
Dosen Pembimbing : 1. Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt.

telah melakukan cek plagiasi pada naskah Skripsi sebagaimana judul di atas, dengan hasil sebagai berikut:

	Tugas Akhir
	15%
Similarity	2%

**) Similarity maksimal 15% untuk setiap Bab.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengurusan bebas tanggungan di UPT. Perpustakaan UMM.

Malang, 30 Januari 2024

A.n Ka. Prodi HI,
Sek. Prodi I HI,



Prof. Gonda Yunitro, M.A., Ph.D.



Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 469 435

Kampus II
Jl. Bendungan Gutani No 188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

**PERAN KELOMPOK INDUSTRI PERSENJATAAN TERHADAP
KEBIJAKAN EKSPOR PERSENJATAAN AMERIKA SERIKAT PADA
MASA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP: STUDI KASUS ARAB SAUDI**

Rizki Ramadhan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah

Malang

Email: rizkiramadhan3d2.5@gmail.com

Abstrak

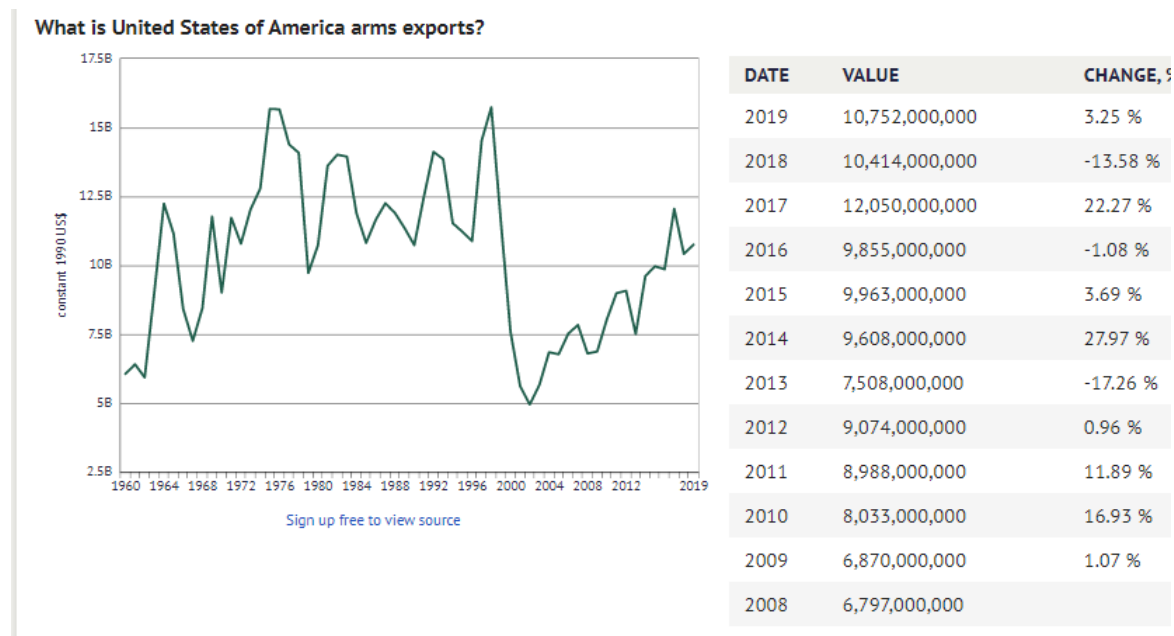
Statistik menunjukkan bahwa Amerika Serikat selama masa pemerintahan Donald Trump mengalami peningkatan jumlah ekspor persenjataan dengan jumlah yang cukup besar. Setidaknya, pada tiga tahun masa kepemimpinan Donald Trump (2017 -2019), ekspor persenjataan Amerika Serikat mencapai angka rata-rata tertinggi dalam 20 tahun yakni 11,07 miliar TIV (*Trend Indicator Value*) pertahun. Angka ini naik kurang lebih 20% jika dibandingkan dengan nilai ekspor persenjataan selama 4 tahun masa pemerintahan Barack Obama periode kedua. Meningkatnya ekspor persenjataan tentu memberikan angin segar bagi industri manufaktur persenjataan Amerika Serikat. Pengambilan keputusan dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat banyak dipengaruhi oleh kelompok kepentingan (*lobbying group*), tak terkecuali dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan ekspor persenjataan. Atas dasar itu, penulis berupaya untuk menganalisis bagaimana dan sejauh mana pengaruh kelompok kepentingan dalam peningkatan ekspor persenjataan Amerika Serikat di masa kepemimpinan Donald Trump. Sebagai instrumen dalam analisis topik ini, penulis akan menggunakan perspektif politik domestik dalam analisis kebijakan luar negeri. Dan penulis menyimpulkan, hasil analisis menggunakan 5 variabel pemetaan politik domestik bahwa kelompok industri persenjataan berpengaruh terhadap kebijakan ekspor persenjataan ke Arab Saudi.

Kata Kunci: *Amerika Serikat, ekspor senjata, kelompok kepentingan, Donald Trump, senjata, keamanan*

A. LATAR BELAKANG

Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan kapasitas industri persenjataan yang paling maju dan produktif di seluruh dunia, jika ditarik ke belakang sejarah senjata api modern di Amerika Serikat diawali oleh kedatangan para penjajah Eropa yang datang ke di abad ke 18, dan sosok *gunsmith* yang mengawali produksi persenjataan Amerika Serikat dengan perusahaan persenjataannya ialah Eliphalet Remington yang mendirikan *The Remington Arms* pada tahun 1816 (O'Neill, 2023). Adapun Predikat Amerika Serikat sebagai salah satu negara dengan kapasitas persenjataan paling maju bahkan telah dikenal sejak Perang Dunia II. Atas dasar ini, wajar jika Amerika Serikat telah secara konsisten melakukan penjualan senjata kepada negara lain sejak dulu. Pada masa Perang Dingin , Amerika Serikat seakan menegaskan kapasitasnya sebagai negara penyuplai persenjataan terbesar di dunia, terutama kepada sekutu-sekutunya untuk mempertahankan diri melawan pengaruh Uni Soviet. Menurut data yang diperoleh dari *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), dimulai dari tahun 1950 ekspor persenjataan dapat mencapai 9-14 miliar TIV setiap tahunnya.¹ Menyusul berakhirnya Perang Dingin yang ditandai oleh bubarnya Uni Soviet, ekspor persenjataan Amerika Serikat turun drastis hingga berkisar 4 miliar TIV per tahun. Namun, sejak munculnya ancaman terorisme global dan inisiasi *War on Terror*, jumlah ekspor persenjataan Amerika Serikat mulai berangsur naik kembali (Wezeman et al., 2020). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan ekspor persenjataan Amerika Serikat sejalan dengan timbulnya isu keamanan dan konflik bersenjata di dunia; terutama yang berkaitan dengan negara yang beraliansi dengan Amerika Serikat.

¹ TIV (*Trend-indicator Value*) adalah sebuah satuan khusus yang digagas oleh SIPRI merepresentasikan tren dalam perpindahan persenjataan secara internasional antara periode. Kalkulasi dari SIPRI tidak hanya memperhitungkan nilai finansial dari ekspor/impur persenjataan, namun turut memperhitungkan transfer kapabilitas militer yang disebabkan oleh ekspor/impur tersebut. Meskipun demikian, TIV tetap dapat diperhitungkan dalam melihat tren peningkatan/penurunan ekspor persenjataan. Penulis merasa bahwa statistik ini lebih representatif dan memudahkan pengumpulan data karena data ekspor yang bersifat *year-over-year* cukup terfragmentasi. Satuan ini dipergunakan oleh banyak lembaga, termasuk *think-tank* internasional dan lembaga riset Kongres AS



Gambar 1 Statistik Ekspor Persenjataan AS

Sumber: Stockholm International Peace Research Institute

Namun yang menjadi menarik adalah pada masa kepemimpinan Donald Trump, terjadi peningkatan nilai ekspor persenjataan yang cukup signifikan jika dibandingkan pada periode kedua masa kepemimpinan Barack Obama (2013-2016) dan juga masa kepemimpinan Joe Biden. Setidaknya, pada tiga tahun masa kepemimpinan Donald Trump (2017-2019), ekspor persenjataan Amerika Serikat mencapai angka rata-rata tertinggi dalam 20 tahun yakni 11,07 miliar TIV pertahun. Angka ini naik kurang lebih 20% jika dibandingkan dengan nilai ekspor persenjataan selama 4 tahun masa pemerintahan Barack Obama periode kedua. Padahal, dalam periode kepemimpinan Donald Trump, terjadi tren penurunan konflik dibandingkan dengan masa kepemimpinan Barack Obama. Beberapa peristiwa yang mengindikasikan hal tersebut adalah deklarasi kemenangan Pemerintah Irak terhadap ISIS, ditariknya pasukan Amerika Serikat dari Suriah, serta penurunan eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah (Dupuy, 2018). Di samping itu, terdapat banyak kritikan terhadap *keikutsertaan* Amerika Serikat dalam konflik Arab Saudi di Yaman, dengan mengekspor persenjataan dalam jumlah yang amat besar. Bahkan, terdapat beberapa upaya entah baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun Senat untuk menghalangi realisasi penjualan tersebut. Meskipun demikian, penjualan senjata ke Arab Saudi—sebagai penyumbang ekspor persenjataan terbesar dalam periode 2017-2019—tetap terealisasi (Huang, 2020).

Kelompok kepentingan (industri persenjataan) dan pelobi merupakan aktor yang cukup berperan dalam pembuatan kebijakan di Amerika Serikat. Dalam kasus ekspor senjata Amerika Serikat ke Arab Saudi, beberapa pemimpin senior dalam birokrasi Departemen Pertahanan (Department of Defense), eksekutif dan legislatif dalam kedua pemerintahan, kemudian perantara penting yaitu, para pelobi, public relations firms, dan think tanks, merupakan aktor-aktor kunci yang membentuk hubungan atau jaringan kompleks yang disebut Military-Industrial Complex (MIC) (Vittori et al., 2019). Meskipun identik dengan tindakan berkonotasi buruk serta sering diasosiasikan dengan perilaku koruptif atau konflik kepentingan, legitimasi dari lobi dalam proses politik dalam sistem demokrasi merupakan hal yang dapat diterima. Bahkan, lobi dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari politik Amerika Serikat; yang merupakan perwujudan dari Konstitusi Amandemen Pertama yakni kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dengan damai, serta mengajukan petisi kepada pemerintah. Berdasarkan argumentasi akademis yang dinyatakan oleh Amy McKay pada tahun 2012, kelompok kepentingan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan kebijakan. Dia menambahkan bahwa kelompok kepentingan yang memiliki sumber pendanaan yang besar berkorelasi secara positif pada prediktabilitas pembuatan kebijakan. Dengan kata lain, kelompok kepentingan dengan sumber finansial yang besar memiliki kecenderungan untuk 'memenangi' lobi yang dilakukan kepada pembuat kebijakan (McKay, 2012).

Sedangkan di saat yang sama, industri persenjataan Amerika Serikat merupakan lembaga yang secara aktif melakukan lobi. Menurut data yang dipublikasikan oleh rilis *Transparency International Defense and Security Program*, dijelaskan bahwa pada tahun 2018 industri persenjataan menyumbang pengeluaran lobi tertinggi kesepuluh. Lebih lanjut, disebutkan pula bahwa pada tahun 2018—meskipun bukan tahun pemilihan umum—industri persenjataan Amerika Serikat mempekerjakan 770 pelobi yang terdaftar serta mengeluarkan kurang lebih US\$126 juta untuk lobi itu sendiri (Vittori et al., 2019).

Terdapat beberapa temuan atas penelitian yang diarahkan terhadap pengaruh kelompok kepentingan dalam pembuatan kebijakan. Kelompok kepentingan mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri dengan memberikan pertimbangan terhadap isu-isu spesifik untuk selanjutnya diangkat di tataran internasional

(Flöthe, 2020). Seperti halnya, sejak Konferensi Stockholm tentang Lingkungan disepakati tahun 1972 oleh PBB, kelompok bisnis mulai mempengaruhi

kebijakan luar negeri di sektor lingkungan, termasuk menjadikan aturan dan regulasi lingkungan internasional sebagai acuan sebagai strategi global (Falkner, 2017).

Martin Gilens dan Benjamin I. Page (Gilens & Page, 2014) dalam tulisannya menyatakan bahwa *policymaking* di Amerika Serikat dikuasai oleh kelompok bisnis besar yang juga diyakini mereka mengancam demokrasi Amerika Serikat, penelitian Katherine Elizabeth Smith (Smith et al., 2015) yang mengatakan bahwa kelompok pengusaha dengan modal besar bisa membentuk koalisi advokasi, diperkuat juga melalui Tulisan Allan J. Ciglar & Burdett A. Loomis (Ciglar et al., 2016) yang menyatakan bahwa kerap kali kelompok kepentingan sukses menggunakan litigasi untuk meneruskan kepentingan mereka hingga menjadi kebijakan publik.

Lebih lanjut, beberapa akademisi justru melihat peranan kelompok kepentingan dalam pembuatan kebijakan luar negeri secara lebih pesimistis. Terlepas dari efektivitasnya dalam mempengaruhi kebijakan, kelompok kepentingan justru berisiko mempengaruhi kebijakan luar negeri semata-mata atas kepentingan golongan tertentu ketimbang kepentingan mayoritas publik (Becher & Stegmueller, 2021). Beberapa penelitian yang menunjukkan pesimisme terhadap keefektivitasan kelompok kepentingan diantaranya penelitian dari Maja Kluger Rasmussen (Rasmussen, 2012) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa kelompok kepentingan kerap kali gagal untuk menyukseskan kepentingannya pada proposal komisi eropa, lalu Andreas Dur (Dur et al., 2015) juga menyatakan secara garis besar proses *lobbying* justru kerap kali tidak begitu menguntungkan bagi para kelompok kepentingan termasuk kelompok bisnis, Eitan Hersh (Hersh, 2023) menyatakan bahwa *interest group* tidak begitu memberikan peranan signifikan terhadap pembuatan kebijakan, bahkan parlemen bisa menahan aspirasi politik dari kelompok privilese seperti para konglomerat. Dari penelitian-penelitian tersebut terdapat diferensiasi pendapat dari berbagai macam ahli terkait pengaruh kelompok kepentingan atau *interest group* dalam proses lobi maupun pembuatan dan penyusunan aturan.

Arab Saudi, selain secara historis merupakan pengimpor senjata terbesar bagi Amerika Serikat, juga memiliki rekam jejak yang buruk dalam hal Hak Asasi Manusia. Titik balik hubungan Amerika Serikat dengan Arab Saudi dimulai setelah kematian seorang jurnalis, Jamal Khashoggi, pada 2 Oktober 2018 di Konsulat Arab Saudi di Turki. Peristiwa tragis lainnya yang melibatkan senjata Amerika terjadi pada 9 Agustus 2018, yakni serangan bom terhadap bus sekolah yang menewaskan

44 anak sekolah dan 10 orang dewasa. Peristiwa tersebut semakin meningkatkan perhatian sekaligus tekanan dari komunitas internasional untuk menghentikan penjualan senjata Amerika kepada Arab Saudi (Vittori et al., 2019).

Meskipun terdapat kecenderungan yang jelas dan meningkat dari para politis untuk menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi, seperti halnya yang dilakukan oleh Kongres AS melalui National Defense Authorization Act (NDAA), kenyataannya ekspor senjata terus berlangsung. Pada Mei 2019, pemerintahan Trump mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan celah legislatif untuk menjual senjata senilai \$8 miliar kepada Arab Saudi dan UEA, tanpa melibatkan Kongres. Upaya Kongres untuk menghentikan penjualan ini di-veto oleh Pemerintahan Trump. Di sisi lain, Senat tidak mampu mengumpulkan suara mayoritas yang dibutuhkan untuk meloloskan veto tersebut, sehingga meskipun ada upaya keras dari Kongres, penjualan senjata tetap dilanjutkan (Vittori et al., 2019)

Adanya peningkatan ekspor persenjataan yang signifikan di tengah penurunan tren konflik bersenjata dan ancaman keamanan, serta aktivitas lobi industri persenjataan yang cukup intens meningkatkan kecurigaan penulis akan hubungan dari kedua variabel tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memiliki rumusan masalah yakni *bagaimana peran kelompok kepentingan/lobi industri persenjataan Amerika Serikat dalam peningkatan ekspor persenjataan Amerika Serikat selama masa kepemimpinan Donald Trump?*

Adapun kebaruan penelitian ini adalah, penggunaan konsep politik domestik sebagai konsep untuk menganalisis temuan, dan menjadikan industri persenjataan sebagai objek penelitian yang penulis teliti.

B. KERANGKA TEORETIS

Sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan di atas, penulis menggunakan konsep politik domestik yang dibawakan oleh Valerie M. Hudson dan Benjamin S. Day dalam bukunya yang berjudul *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Pada dasarnya, konsep ini adalah salah satu konsep yang digunakan dalam analisis kebijakan luar negeri yang lebih menekankan pada dinamika perebutan pengaruh di dalam negara, terutama dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan luar negeri. Konsep ini juga dapat dipergunakan untuk mengukur maupun memprediksi tingkat pengaruh suatu aktor domestik dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

Politik Domestik

Orientasi utama dari analisis kebijakan luar negeri adalah untuk membuka kotak hitam (*opening the black box*) kebijakan luar negeri. Salah satu aspek kajian analisis kebijakan luar negeri adalah politik domestik. Konsep politik domestik lebih menekankan pada perebutan pengaruh antara aktor-aktor yang ada di dalam level domestik. Aktor-aktor tersebut tidak hanya terbatas pada aktor yang secara langsung terlibat dalam pemerintahan, namun aktor dengan lingkup yang lebih luas seperti partai politik serta sumber-sumber pengaruh yang berasal dari masyarakat lainnya mulai dari organisasi masyarakat, kelompok kepentingan, kelompok masyarakat, bahkan hingga lingkup yang terkecil seperti seorang partisipan pemilu (Hudson & Day, 2020).

Dalam tulisan ini, analisis akan ditekankan pada peran aktor dalam politik domestik—untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hudson dan Day mengutip pernyataan Robert Putnam yang menganalogikan politik domestik sebagai dua permainan yang dilakukan secara bersamaan. Dalam artian lain, apa pun peristiwa yang terjadi dalam level politik secara internasional pasti akan mempengaruhi dinamika di level domestik; serta segala dinamika yang terjadi dalam level domestik akan berdampak pada politik di level internasional.

Hal lain yang dianalisis dalam politik domestik adalah pemetaan dari aktor-aktor politik domestik yang terlibat. Tentu, tidak aktor domestik memiliki peranan dan pengaruh yang sama dalam kebijakan luar negeri suatu rezim. Hudson dan Day berargumentasi bahwa terdapat lima dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur pemetaan atau pengaruh (potensial) dalam kebijakan luar negeri, yakni: kedekatan (*proximity*), kohesivitas, ukuran, sudut pandang, dan tingkat aktivitas (Hudson & Day, 2020). Berikut ini adalah penjelasan dari setiap dimensi tersebut.

Kedekatan (*proximity*) dalam politik domestik adalah posisi aktor dalam posisi pengambilan kebijakan luar negeri. Jika faktor lain dianggap sama semakin dekat suatu aktor dalam proses, institusi, maupun pelaku utama dalam pembuatan kebijakan memiliki kecenderungan lebih untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

Kohesivitas dalam politik domestik merefleksikan seberapa kohesif atau terpecahnya kondisi politik dari suatu negara. Hudson dan Day berpendapat bahwa variabel kohesivitas suatu rezim terlihat dari derajat keterbelahan di dalam suatu rezim. Contohnya, kohesivitas yang tinggi dapat tercermin dari dominasi partai

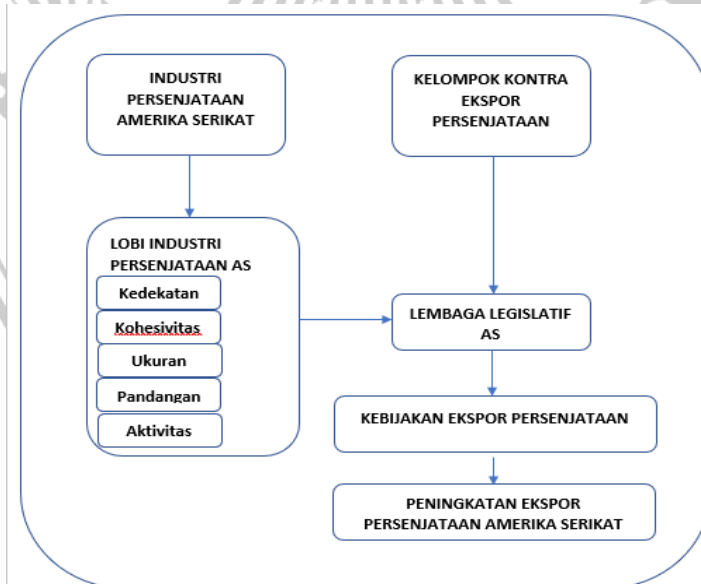
penguasa dalam politik suatu rezim tanpa adanya kekuatan perlawanan politik dari oposisi yang signifikan. Sedangkan kohesivitas yang rendah (fragmentasi) dapat tercermin dari kondisi hadirnya pihak oposisi yang kuat dan perlawanan politik yang cukup signifikan dari pihak-pihak lain yang berseberangan dengan pemerintah. Kondisi politik yang terfragmentasi memberikan potensi hambatan lebih bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan luar negeri (Hudson & Day, 2020).

Ukuran dalam politik domestik mengukur ukuran dalam segi apapun yang dimiliki suatu aktor dalam yang dirasa memiliki signifikansi dalam mempengaruhi pengambilan keputusan, seperti besaran pendanaan, jumlah basis dukungan, jumlah pemilih, serta hal-hal lain yang dapat diukur.

Sedangkan derajat sudut pandang mengacu pada seberapa besar perbedaan pandangan terhadap suatu isu antara rezim dan aktor-aktor lain yang terkait. Perbedaan sudut pandang ini dapat bervariasi, mulai dari perbedaan yang didasari oleh perbedaan secara ideologis maupun perbedaan pandangan dalam isu-isu tertentu (Hudson & Day, 2020).

Terakhir, aktivitas merujuk pada seberapa aktif suatu aktor melakukan tindakan dalam sebuah isu untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri. Seperti halnya, aktor dengan derajat aktivitas yang tinggi dapat dicontohkan dengan suatu lembaga swadaya masyarakat yang secara konsisten melakukan unjuk rasa untuk menegaskan pandangan kelompoknya terhadap suatu isu (Hudson & Day, 2020).

Model Analisis



Gambar 2 Model Analisis
Sumber: Olahan Pribadi

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif yang meneliti Peran Kelompok Industri Persenjataan Terhadap Kebijakan Ekspor Persenjataan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Donald Trump: Studi Kasus: Arab Saudi. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang secara luas merujuk pada pengumpulan data non numerik yang kemudian dianalisa (Lamont, 2015). Lalu untuk tipe penelitian, penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menjawab pertanyaan dengan mendeskripsikan sesuatu sesuai dengan fakta yang ada (Mas'ood, 1990). Metode pengumpulan data yang akan digunakan berupa metode library research atau kajian pustaka. Data sekunder diperoleh melalui jurnal, buku, serta website yang menunjang penelitian Peran Kelompok Industri Persenjataan Terhadap Kebijakan Ekspor Persenjataan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Donald Trump: Studi Kasus: Arab Saudi. Data penelitian diolah dengan menggunakan teknik deduktif. Teknik deduktif merupakan teknik analisa yang berangkat dari proposisi suatu teori yang nantinya akan memunculkan suatu hipotesa. Hipotesa lalu dibuktikan melalui data yang telah terkumpul (Rosyidin, 2020). Dalam sebuah penelitian, perlu untuk menentukan tingkat analisa, batas ruang lingkup, pendekatan, dan metode yang digunakan (Lamont, 2015). Batasan masalah diperlukan agar penelitian dapat terfokus dan terarah. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang Peran Kelompok Industri Persenjataan Terhadap Kebijakan Ekspor Persenjataan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Donald Trump: Studi Kasus: Arab Saudi pada 3 tahun awal masa kepemimpinan Presiden Donald Trump.

D. PEMBAHASAN

Signifikansi Industri Persenjataan Amerika Serikat pada Masa Kepemimpinan Donald Trump

Industri persenjataan Amerika Serikat adalah yang terbesar di dunia. 42 dari 100 perusahaan persenjataan dunia dan 5 dari 10 perusahaan persenjataan teratas adalah perusahaan Amerika Serikat. Pada tahun 2018, perusahaan persenjataan Amerika Serikat mencetak penjualan sebesar US\$226.6 miliar yang setara dengan 57% keseluruhan penjualan senjata dunia (Manolache, 2020). Sebagian besar dari penjualan industri persenjataan Amerika Serikat adalah untuk Pemerintahan Federal AS, yang menjadikan industri ini sebagai salah satu yang menerima paling banyak uang pembayar pajak Amerika atau lebih tepatnya menempati urutan ke 3 terbesar

setelah asuransi kesehatan dan jaminan sosial (CBPP, 2023). Pada tahun 2017, General Dynamics menerima kontrak dari Pemerintah AS sebesar US\$15,3 miliar, atau setara dengan tiga persen dari seluruh anggaran publik yang dibayarkan menuju perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah. Di tahun yang sama, perusahaan manufaktur persenjataan terbesar di dunia, Lockheed Martin mendapatkan kontrak senilai US\$36 miliar oleh Pemerintah AS baik sebagai kontraktor utama maupun subkontraktor. Nilai tersebut setara dengan 69% dari penjualan bersih Lockheed Martin di tahun 2017 (Vittori et al., 2019).

Dari segi perekonomian domestik, industri persenjataan merupakan kekuatan besar dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja Amerika Serikat. Pada tahun 2017, 10% dari keseluruhan output manufaktur Amerika Serikat yang senilai US\$2,2 triliun disumbang oleh industri persenjataan untuk Kementerian Pertahanan (Department of Defense/DoD). Selain itu, industri persenjataan juga menyerap 839.171 tenaga kerja lokal Amerika Serikat di tahun 2016 dengan rata-rata penghasilan di atas rata-rata nasional (Lineberger et al., 2017).

Potensi ekonomi ekspor persenjataan yang menjadi salah satu fokus produksi utama industri persenjataan Amerika Serikat juga sangat signifikan. Sejak tahun 2007 hingga 2014, ekspor persenjataan dan perlengkapan militer Amerika Serikat mewakili sekitar 6,1% dari keseluruhan ekspor Amerika Serikat. Jika dibandingkan, Rusia yang saat ini menjadi eksportir persenjataan kedua terbesar di dunia hanya berkisar 1,9% di periode yang sama. Pada tahun 2018, penjualan persenjataan Amerika Serikat (mencakup ekspor dan belanja persenjataan pemerintah) mencapai US\$82,2 miliar, dengan US\$49,1 miliar di antaranya diproses melalui program penjualan militer luar negeri Pentagon (Pentagon's Foreign Military Sales Program/FMS Program) dan US\$29,7 miliar lainnya yang dijual dalam skema penjualan langsung antara perusahaan persenjataan Amerika Serikat dan pemerintah luar negeri. Tingginya ekspor persenjataan Amerika Serikat juga melampaui nilai persenjataan yang mereka impor sehingga berpengaruh secara positif pada neraca pembayaran mereka (Vittori et al., 2019).

Perusahaan persenjataan Amerika Serikat juga memiliki signifikansi politik, terutama dalam hal kebijakan luar negeri. Ekspor persenjataan dapat memiliki efek yang signifikan dalam kebijakan luar negeri serta berpotensi membahayakan bagi Amerika Serikat sendiri jika penjualan tersebut jatuh ke tangan yang salah. Seperti halnya, keputusan ekspor persenjataan dan pelatihan militer yang diberikan kepada

rezim otoriter Shah Iran merupakan salah satu pemantik Revolusi Iran yang hingga saat ini mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah (Vittori et al., 2019).

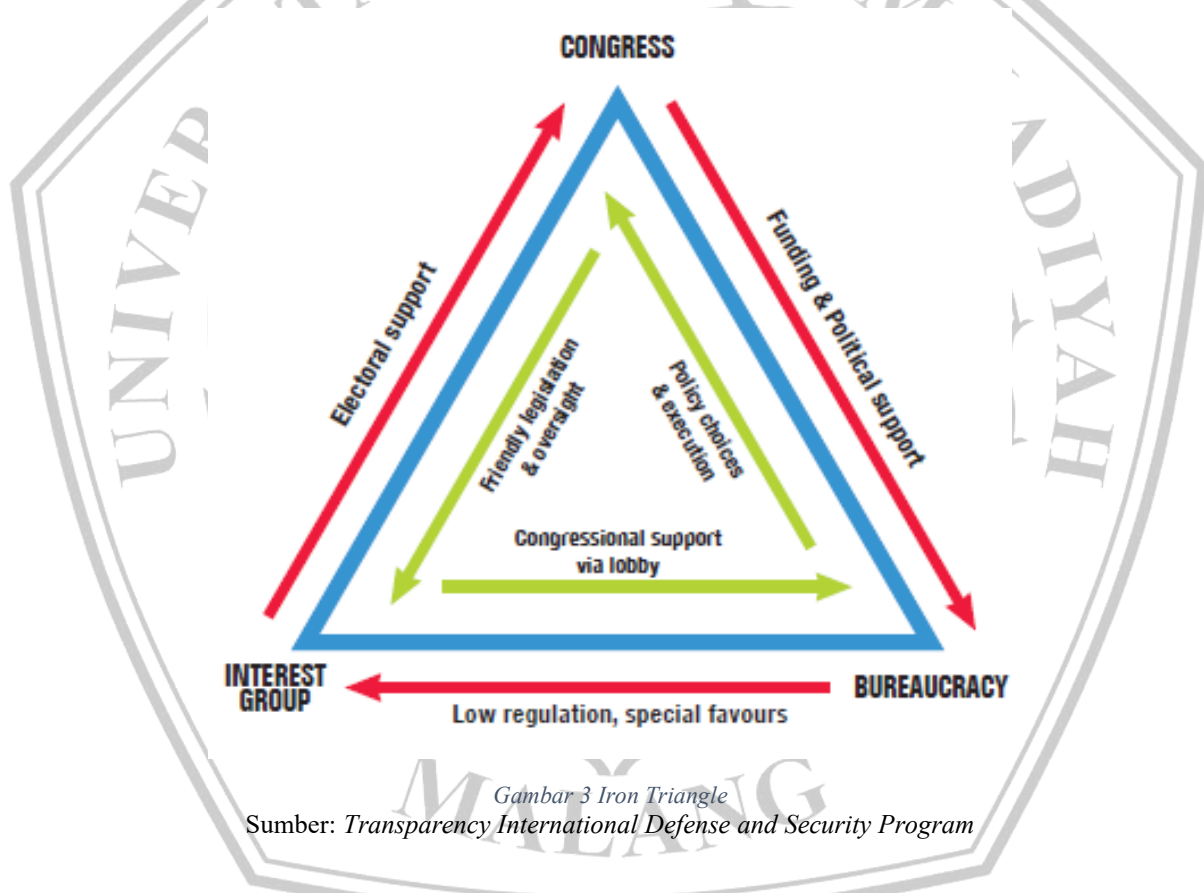
Setidaknya, terdapat tiga argumentasi politis utama yang mendukung ekspor senjata Amerika Serikat. Pertama, para pendukung isu tersebut melihat bahwa ekspor senjata dapat mengatasi ancaman keamanan Amerika Serikat dengan meningkatkan kapabilitas militer sekutu untuk memberikan daya gentar bagi musuh-musuhnya, meningkatkan stabilitas regional, dan melawan terorisme. Kedua, penjualan senjata dapat memberikan Amerika Serikat pengaruh di antara aliansi-aliansinya—terutama para importir. Ketiga, penjualan senjata dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal Amerika Serikat serta meningkatkan perekonomian. Argumentasi ini adalah argumentasi yang paling populer di tingkat domestik Amerika Serikat (Vittori et al., 2019).

Lobi Industri Persenjataan Amerika Serikat

Menurut undang-undang *The Lobbying Disclosure Act* yang dikeluarkan pada tahun 1995, didefinisikan bahwa lobi adalah suatu komunikasi yang bersifat lisan maupun tulisan kepada cabang legislatif maupun eksekutif sebagai perwakilan dari klien dalam formulasi, modifikasi, atau adopsi legislasi federal, regulasi federal, peraturan pemerintah, atau program serta kebijakan lainnya di dalam Pemerintahan Amerika Serikat. Peran pelobi adalah sebagai penghubung antara kelompok kepentingan dengan anggota kongres. Salah satu tugas pelobi dalam melakukan fungsinya adalah dengan memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, terutama informasi yang berkaitan dengan isu-isu detail yang tidak diketahui secara luas. Alih-alih dengan melakukan perjanjian pertukaran jasa (*quid-pro-quo*), proses lobi—terutama yang umumnya terjadi di Amerika Serikat dilakukan dengan berbagai upaya pendekatan dan pembangunan relasi yang diperkuat dengan jalinan mendalam serta interaksi yang berulang.

Salah satu peran lobi, terutama bagi anggota kongres adalah sebagai salah satu cara untuk menghimpun dukungan dari berbagai donor, baik dukungan secara konstituen maupun finansial. Para pelobi profesional sering kali mampu untuk mengumpulkan dana sumbangan dari berbagai donor entah itu kelompok kepentingan, individu, maupun pelaku usaha—sebagai upaya untuk mempengaruhi kebijakan agar sesuai dengan kepentingan—yang kemudian memanfaatkan segala celah dalam regulasi pendanaan (Vittori et al., 2019).

Lobi di Amerika Serikat sering dianggap sebagai sebuah investasi. Pada dasarnya, jika proses lobi berhasil para donor akan mendapatkan hasil yang setimpal. Berdasarkan beberapa penelitian, didapat bahwa proses lobi memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kepentingan finansial pendananya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Kansas menemukan bahwa imbal hasil lobi terhadap *Jobs Creation Act 2004* berkisar 22.000% dari uang yang dikeluarkan untuk mendanai lobi. Sedangkan penelitian lain menemukan bahwa setiap satu dolar yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan lobi dapat menghasilkan antara 2 hingga 20 dolar dalam bentuk pengurangan pajak, dan perusahaan tersebut mengalami penurunan rasio pajak sebesar 0,5-1,6% di tahun berikutnya (Vittori et al., 2019).



Oleh karena itu, banyak perusahaan di Amerika Serikat yang secara aktif melakukan lobi. Industri persenjataan sendiri adalah salah satu penyumbang pengeluaran lobi terbesar di Amerika Serikat. Di tahun 2018 sendiri, industri ini merealisasikan pengeluaran senilai US\$126 juta untuk lobi. Diprediksi, US\$27 juta dialirkan menuju kandidat politik, dengan kandidat Partai Republik mencapai US\$16,4 dan Partai Demokrat mencapai US\$11 juta (Vittori et al., 2019). Bahkan

diperkirakan, industri persenjataan adalah sektor industri yang menerima potensi imbal balik pengeluaran lobi dan kontribusi kampanye terbesar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sunlight Foundation, pasca pemilihan tahun 2012 Lockheed Martin setidaknya menerima manfaat tambahan sebesar US\$3,49 miliar dari total pengeluaran politiknya yang hanya berkisar US\$19,9 juta; atau sekitar US\$175 dari setiap dolar yang dikeluarkan serta Boeing menerima US\$142 setiap dolarnya (Drutman, 2013).

Studi Kasus: Aktivitas Lobi dalam Kebijakan Ekspor Persenjataan ke Arab Saudi

Dalam bagian ini, penulis akan mengukur kekuatan relatif yang dimiliki oleh lobi industri persenjataan Amerika Serikat dan membandingkannya dengan kekuatan relatif yang dimiliki oleh kelompok anti-ekspor persenjataan. Analisis ini menggunakan lima ukuran pemetaan pengaruh/kekuatan relatif dalam politik domestik. Perebutan pengaruh dalam bahasan ini penulis batasi hanya antara lobi industri persenjataan dan lobi/kelompok tertentu yang menolak ekspor persenjataan.

Dalam kurun waktu 2017-2019, Arab Saudi merupakan negara pengimpor persenjataan terbesar Amerika Serikat. Sejak awal masa pemerintahan Donald Trump, impor persenjataan Arab Saudi oleh Amerika Serikat mencapai US\$22,3 miliar, atau sekitar 3,2 miliar TIV pertahun jika menggunakan satuan *trend-indicator value* (Thomas et al., 2021). Adanya belanja persenjataan besar yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi tidak terlepas dari konflik yang terjadi di Yaman hingga saat ini.

Konflik yang melibatkan Arab Saudi dan Houthi di Yaman memiliki banyak kontroversi sejak masa kepemimpinan Barack Obama. Pada saat itu, terjadi beberapa insiden humaniter maupun penyelewengan yang melibatkan militer Arab Saudi beserta aset-aset militer yang diekspor oleh Amerika Serikat, seperti pengeboman terhadap penduduk sipil serta jatuhnya senjata impor Amerika Serikat ke pihak pemberontak. Pada tahun 2016, Presiden Barack Obama menghentikan dukungan militer di konflik tersebut dengan membatalkan ekspor 14,000 peluru kendali senilai US\$350 juta dan menghentikan dukungan intelijen kepada Arab Saudi (Cooper, 2016).

Namun sikap Amerika Serikat berbalik pasca dilantiknya Presiden Donald Trump. Amerika Serikat mulai meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan Arab Saudi serta meningkatkan intensitas operasi di Yaman. Bahkan, dalam kunjungan kenegaraan pertamanya, Donald Trump mengutarakan bahwa Amerika Serikat dan

Arab Saudi menyetujui perjanjian kerja sama jangka panjang di bidang persenjataan senilai US\$110 miliar. Trump mengatakan bahwa kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan Arab Saudi terhadap ancaman Iran dan terorisme di kawasan tersebut. Adanya perjanjian—bahkan pembicaraan dengan Pemerintah Arab Saudi—menunjukkan bahwa Donald Trump memiliki intensi lebih untuk meningkatkan kerja sama persenjataan dengan Arab Saudi—meskipun pada akhirnya ekspor yang terealisasi tak lebih dari 15% dari angka yang disebutkan (David, 2017).

Tidak hanya itu, pada bulan Mei 2019, meskipun di tengah tekanan untuk membatalkan perjanjian penjualan persenjataan sebesar US\$8 miliar, Presiden Donald Trump justru menyatakan kondisi darurat nasional terhadap ancaman Iran untuk memuluskan realisasi penjualan tersebut. Dengan deklarasi tersebut, Trump dapat menghilangkan kewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada kongres selama 30 hari sebelum merealisasikan penjualan senjata (Zengerle, 2019). Sebagai respons dari tindakan Trump tersebut, dua senator yang berasal dari kedua partai, Senator Robert Menendez (New Jersey-Demokrat) dan Lindsey Graham (South Carolina-Republikan) menggagas 22 rancangan undang-undang yang mewakili setiap perjanjian penjualan senjata untuk membatalkan penjualan. Namun, RUU tersebut gagal untuk disahkan karena tidak berhasil mencapai dua pertiga suara (45-40) (BBC, 2019).

Penulis melihat bahwa terdapat beberapa indikasi peran kelompok kepentingan maupun lobi politik dalam mempengaruhi keputusan ekspor senjata ke Arab Saudi; terutama yang membuat Donald Trump mati-matian untuk merealisasikan ekspor persenjataan ke Arab Saudi. Pertama, terdapat indikasi bahwa terdapat pengaruh lobi yang kuat dari Boeing, salah satu pemain utama dalam industri persenjataan Amerika Serikat—termasuk penerima manfaat dari kebijakan belanja maupun ekspor persenjataan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Menurut data dari *The Center for Responsible Politics*, Boeing secara konstan menggelontorkan dana untuk melobi Pemerintah AS, yang setiap tahunnya dapat mencapai US\$15-23 miliar. Selain itu, dalam pemilihan umum tahun 2018 Boeing juga memberikan sumbangan dana kampanye kepada kandidat Senat dan Kongres dari kedua partai (masing-masing berkisar US\$130-170 ribu. Boeing juga diketahui menyumbang sekitar US\$1 juta kepada komite pelantikan Presiden Donald Trump (Timmons & Frost, 2019).

Selain itu, terdapat sebuah kondisi *revolving door* antara Pemerintah AS dan pihak Boeing. Perlu diketahui, kondisi tersebut dapat diartikan sebagai sebuah kondisi berpindahannya pejabat pemerintahan/negara ke sektor swasta maupun sebaliknya; yang tentunya menimbulkan potensi konflik kepentingan. Dalam kasus ini, Donald Trump mengangkat Patrick M. Shanahan, seorang petinggi Boeing yang telah menjabat sejak tahun 1986 sebagai Wakil Menteri (yang kemudian diangkat menjadi menteri pada tahun 2019) Pertahanan menggantikan James Mattis, seorang mantan Jenderal Korps Marinir meskipun tidak memiliki latar belakang militer. Selain itu, Boeing juga dilaporkan telah mempekerjakan 19 pejabat Kementerian Pertahanan serta beberapa staf kongres (*congressional aides*) dan pejabat eksekutif pemerintahan. Hasilnya, Boeing berhasil menerima US\$21 miliar pada tahun 2017 serta kontrak senilai jutaan dolar lainnya di tahun setelahnya (Timmons & Frost, 2019).

Kedua, sejak masa kepemimpinan Donald Trump, Arab Saudi mulai aktif melakukan lobi di kalangan pemerintah maupun legislatif Amerika Serikat. Menurut laporan dari *Foreign Influence Transparency Initiative* yang penulis sadur dari The Washington Post, dilaporkan bahwa lembaga-lembaga lobi yang terdaftar di Amerika Serikat telah menerima lebih dari US\$40 juta dari Arab Saudi pada tahun 2017 dan 2018. Pelobi Arab Saudi juga dilaporkan telah menjalin kontak dengan Kongres, pejabat eksekutif, dan kanal media sebanyak 4.000 kali. Utamanya, lobi-lobi tersebut ditujukan untuk memuluskan penjualan persenjataan Amerika Serikat kepada Arab Saudi yang dipenuhi kontroversi serta penolakan dari Senat (Freeman, 2019).

Analisis Dimensi Pengaruh Politik Domestik dalam Lobi Perusahaan Persenjataan

Keberhasilan dalam proses lobi dapat dilihat dari hasil pembuatan kebijakan; dalam hal ini berupa kebijakan ekspor persenjataan menuju Arab Saudi. Dengan terealisasinya ekspor senjata ini maka proses lobi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan yakni industri persenjataan Amerika Serikat dan Pemerintah Arab Saudi berhasil. Menurut penulis, keberhasilan upaya lobi ini linear dengan formulasi Hudson dan Day, yakni lima dimensi dalam mengukur potensi pengaruh dalam politik domestik.

Pertama, lobi yang dilakukan oleh industri persenjataan melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan tinggi dengan tokoh pembuat kebijakan dan proses

kebijakan itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, lobi ini melibatkan anggota Senat, anggota Kongres, pejabat-pejabat di Gedung Putih, bahkan Presiden. Selain itu, perwakilan dari pemain besar industri persenjataan Amerika Serikat, Boeing (Patrick M. Shanahan) dan Raytheon (Mark Esper) juga berhasil merebut pengaruh dengan masuk ke dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan dalam masa jabatan yang berbeda.

Kedua, dari sisi kohesivitas kelompok industri persenjataan cukup kohesif. Meskipun mereka terdiri dari perusahaan-perusahaan yang berbeda, mereka membentuk sebuah aliansi informal yang dinamakan *The Military-Industrial Complex* yang sudah eksis sebelum pidato Presiden Dwight D. Eisenhower yang secara eksplisit menyebutkan aliansi tersebut. Selain itu, sifat persaingan industri Amerika Serikat cenderung monopsoni (Amerika Serikat merupakan konsumen utama) serta belanja militer yang tinggi menyebabkan relatif berkurangnya persaingan di dalam industri tersebut. Bahkan sering kali, beberapa industri persenjataan secara bersama-sama melobi satu kebijakan yang sama, seperti *Jobs Creation Act* tahun 2004.

Ketiga, dari segi ukuran lobi yang dilakukan oleh industri persenjataan sangat signifikan. Ukuran ini dapat direfleksikan dari jumlah pendanaan baik untuk aktivitas lobi maupun pendanaan kampanye anggota Senat dan Kongres. Diperkirakan, pada tahun 2018 sendiri industri ini telah menyalurkan pendanaan politik sebesar US\$126 juta, dengan US\$27 juta di antaranya disalurkan untuk keperluan kampanye kandidat/anggota Senat maupun Kongres. Besarnya pendanaan ini diiringi pula dengan besarnya jumlah pelobi yang direkrut oleh industri tersebut, yakni 770 pelobi profesional yang terdaftar di Amerika Serikat.

Keempat, sudut pandang isu industri persenjataan Amerika Serikat relatif serupa, terutama dalam hal ekspor persenjataan Amerika Serikat ke Arab Saudi. Ekspor senjata Amerika Serikat tentu memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut. Terlebih, adanya tren penurunan konflik serta kebijakan Pemerintah AS yang mengeksklusi Turki dari proyek F-35 cukup berdampak pada penjualan industri persenjataan Amerika Serikat.

Terakhir, aktivitas lobi serta pendanaan kampanye yang dilakukan oleh industri persenjataan relatif tinggi. Tingginya aktivitas ini dapat terlihat dari konsistensi dan cakupan dari aktivitas lobi yang dilakukan. Konsistensi ini dapat terlihat dari

aktivitas lobi yang tidak hanya berlangsung secara insidental, namun terus berlanjut sejak sebelum terpilih hingga sampai merekrut *orang dalam* pemerintahan dan staf-staf Kongres yang notabene dekat dengan para anggota Kongres. Selain itu, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, lobi yang didanai oleh Pemerintahan Saudi bahkan telah melakukan setidaknya 4.000 kali lobi dengan berbagai pihak yang berkapasitas mempengaruhi hasil kebijakan ekspor persenjataan. Atas dasar kelima variabel tersebut—yang menunjukkan intensitas tinggi di setiap dimensi pendukung pengaruh dalam politik domestik—maka penulis mengambil kesimpulan besar bahwa lobi kelompok kepentingan—dalam kasus ini industri persenjataan serta dalam kadar tertentu Pemerintah Arab Saudi—berhasil dan berperan besar dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kebijakan inilah yang kemudian berpengaruh pada meningkatnya ekspor persenjataan Amerika Serikat secara global.

E. KESIMPULAN

Dalam perpolitikan di Amerika Serikat, lobi merupakan aktivitas yang cukup sering terjadi. Lobi merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan dengan cara yang legal—meskipun berkonotasi negatif—dan merepresentasikan hak konstitusi rakyat Amerika Serikat untuk melakukan petisi terhadap pemerintah. Proses lobi tentu tidak lepas dari kepentingan pelobinya, yang dalam kasus ini industri persenjataan untuk mengamankan kesepakatan penjualan senjata. Dengan kedekatannya pada pembuat kebijakan, kondisi kelompok kepentingan yang relatif kohesif, ukuran pendanaan yang besar, sudut pandang yang serupa, serta aktivitas lobi yang konsisten dan memiliki cakupan luas industri persenjataan dapat mempengaruhi pembuat kebijakan untuk menerapkan opsi kebijakan luar negeri yang menguntungkan untuk mereka; yakni meloloskan ekspor persenjataan ke Arab Saudi.

Daftar Pustaka

Buku:

Hudson, V. M., & Day, B. S. (2020). *Foreign policy analysis classic and contemporary theory* (3th ed.). Rowman & Littlefield Publishing Group.

Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES

Jurnal:

Becher, M., & Stegmueller, D. (2020). Reducing unequal representation: The impact of labor unions on legislative responsiveness in the U.S. congress. *Perspectives on Politics*, 19(1), 92–109. <https://doi.org/10.1017/s153759272000208x>

Ciglar, A. J., Loomis, B. A., & Nowness, A. J. (Eds.). (2016). *Interest Group Politics* (9th ed.). SAGE Publication.

Dupuy, kendra, & Rustad, S. A. (2018). *Trends in Armed Conflicts, 1946-2017*. Peace Research Institute Oslo: *Conflict Trend*, 5, 1–4.

Dür, A., Bernhagen, P., & Marshall, D. (2015). Interest group success in the European Union. *Comparative Political Studies*, 48(8), 951–983. <https://doi.org/10.1177/0010414014565890>

Falkner, R. (2017). *Business Power and conflict in International Environmental Politics*. Springer.

Flöthe, L. (2019). "Representation through information? when and why interest groups inform policymakers about public preferences". *Journal of European Public Policy*, 27(4), 528–546. <https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1599042>

Gilens, M., & Page, B. I. (2014). Testing theories of American Politics: Elites, interest groups, and average citizens. *Perspectives on Politics*, 12(3), 564–581. <https://doi.org/10.1017/s1537592714001595>

Hersh, E. (2023). The political role of Business Leaders. *Annual Review of Political Science*, 26(1), 97–115. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051921-102505>

Lineberger, R. S. (2017). *Exports and Employment Experience Declining Growth, With an Outlook for Further Challenges*. US Aerospace and Defense Sector Export and Labor Market Study, 1–19.

- McKay, A. (2011). Buying policy? the effects of lobbyists' resources on their policy success. *Political Research Quarterly*, 65(4), 908–923. <https://doi.org/10.1177/1065912911424285>.
- Smith, K. E., Fooks, G., Gilmore, A. B., Collin, J., & Weishaar, H. (2015). Corporate coalitions and policy making in the European Union: How and why british american tobacco promoted “Better regulation.” *Journal of Health Politics, Policy and Law*, 40(2), 325–372. <https://doi.org/10.1215/03616878-2882231>
- Thomas, C., & Blanchard, C. M. (2020). Arms Sales in the Middle East: Trends and Analytical Perspectives for U.S. Policy. Congressional Research Service Report, 1–60..
- Vittori, J. (2019). A Mutual Extortion Racket: The Military Industrial Complex and US Foreign Policy-The Cases of Saudi Arabia and UAE. *Journal of Transparency International Defense and Security Program*, 1–55.
- Wezeman, P. D., Fleurant, A.; Da silva, D. L. (2020). Trends in International Arms Transfer. SIPRI Fact Sheet, 1–31.
- Website:**
- BBC. (2019, July 30). Senate fails to overturn Saudi Arms Sale Veto. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49159850>
- CBPP. (2023, September 28). Policy basics: Where do our federal tax dollars go?. Center on Budget and Policy Priorities. <https://www.cbpp.org/research/policy-basics-where-do-our-federal-tax-dollars-go>
- Cooper, H. (2016, December 14). U.S. blocks arms sale to Saudi Arabia amid concerns over Yemen War. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2016/12/13/us/politics/saudi-arabia-arms-sale-yemen-war.html>.
- David, J. E. (2017, May 22). US-saudi arabia seal weapons deal worth nearly \$110 billion immediately, \$350 billion over 10 years. CNBC. <https://www.cnbc.com/2017/05/20/us-saudi-arabia-seal-weapons-deal-worth-nearly-110-billion-as-trump-begins-visit.html>
- Drutman, L., & Drutman, L. (n.d.). Sunlight Foundation. Sunlight Foundation Blog. <https://sunlightfoundation.com/2013/02/25/sequester-cuts/>.
- Freeman, B. (2019, April 18). Opinion | the Saudi lobbying machine continues to exert influence on Congress - and trump. *The Washington Post*.

- <https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/04/18/saudi-lobbying-machine-continues-exert-influence-congress-trump/>.
- Frost, N., & Timmons, H. (2019, March 14). How money and influence flows between the US government and Boeing. Quartz. <https://qz.com/1572381/the-relationship-between-boeing-trump-and-the-federal-government>
- Held, A. (2019, June 21). In rare rebuke to Trump, Senate votes to block Saudi Arms Sales. NPR. <https://www.npr.org/2019/06/20/734437874/in-rare-rebuke-to-trump-senate-votes-to-block-saudi-arms-sales>
- Huang, R. (2020, February 6). Analysis | armed rebel groups lobby in D.C., just like governments. how does that influence U.S. policy?. The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/politics/2020/02/06/armed-rebel-groups-lobby-dc-just-like-governments-how-does-that-influence-us-policy/>.
- Lobbying disclosure. Guide to the Lobbying Disclosure Act. (n.d.). https://lobbyingdisclosure.house.gov/amended_lda_guide.html
- Manolache, A. (2020, March 9). USA and France dramatically increase major arms exports; Saudi Arabia is largest arms importer, says Sipri. SIPRI. <https://www.sipri.org/media/press-release/2020/usa-and-france-dramatically-increase-major-arms-exports-saudi-arabia-largest-arms-importer-says>
- O'Neill, A. (2023, June 9). Topic: History of guns in the U.S. Statista. <https://www.statista.com/topics/10987/history-of-guns-in-the-us/#topicOverview>
- Rasmussen, M. K. (2012). The influence of interest groups in the European Parliament: Does policy shape politics?. The influence of interest groups in the European Parliament: does policy shape politics? - LSE Theses Online. <http://etheses.lse.ac.uk/698/#.W9Lht2JoLY>.
- Zengerle, P. (2019, May 24). Defying Congress, Trump sets \$8 billion-plus in weapons sales to Saudi Arabia, UAE. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-arms-idUSKCN1SU25R>